



## Pelatihan Dan Pendampingan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Seni Dan Kirab Budaya Pada Desa Cupak Jombang

<sup>1)</sup> Irda Agustin Kustiwi, <sup>2)</sup> Binti Yuliatin, <sup>3)</sup> Dhea Rizky Istiqomah,  
<sup>4)</sup> Nur Wahyu Satriwibowo, <sup>5)</sup> Adelia Febriana, <sup>6)</sup> Gusti Chania Raafi Iradati

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

<sup>1)</sup> [irdakustiwi@untag-sby.ac.id](mailto:irdakustiwi@untag-sby.ac.id), <sup>2)</sup> [bintiyuli@gmail.com](mailto:bintiyuli@gmail.com), <sup>3)</sup> [dhearizky925@gmail.com](mailto:dhearizky925@gmail.com),  
<sup>4)</sup> [wsatria54321@gmail.com](mailto:wsatria54321@gmail.com), <sup>5)</sup> [crsafebriana02@gmail.com](mailto:crsafebriana02@gmail.com), <sup>6)</sup> [gustichania02@gmail.com](mailto:gustichania02@gmail.com)

**Abstract :** *Accountability in village governance is crucial to ensure responsible government oversight of village financial management and prevent misappropriation. Cupak Village, renowned as a religious tourism destination in Gunung Pucangan, possesses potential in the craft of weaving mats using pandan leaves. However, the village community lacks the capacity to fully utilize this potential as an additional source of income. To address various issues faced by the community, particularly in establishing accountability in event fund management for a cultural parade called "Kirab Budaya," a community engagement activity called the "Matching Fund Kedaireka 2022" was conducted in Cupak Village, Ngusikan District, Jombang Regency. The implementation aimed to generate significant outcomes in the planning of the cultural parade event, enhance the sustainability of community welfare, and boost the economic potential of Cupak Village. The arts and cultural program employed various approaches, including socialization, training, and mentoring. The training program was designed to provide the community with understanding and skills related to financial matters and accountability in fund management.*

**Keywords:** *Matching Fund, Arts and Cultural Parade, Accountability.*

Abstrak : Akuntabilitas dalam pemerintahan desa untuk mewujudkan pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa agar tidak terjadi penyelewengan. Desa Cupak yang dinobatkan sebagai desa wisata religi Gunung Pucangan, memiliki potensi kerajinan dalam anyaman tikar dengan memanfaatkan daun pandan sebagai kerajinan. Akan tetapi masyarakat desa kurang mampu dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki tersebut untuk sebagai tambahan sumber penghasilan. Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan nama Matching Fund Kedaireka 2022 yang dilaksanakan di Desa Cupak, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang. Pelaksanaan ini ditujukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat terutama dalam membangun akuntabilitas pengelolaan dana acara kirab budaya untuk menghasilkan sejumlah hasil yang signifikan dalam perencanaan acara kirab budaya tersebut, membangun keberlanjutan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan potensi ekonomi warga Desa Cupak. Bentuk pelaksanaan yang dilakukan oleh program kerja seni dan budaya adalah dengan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan. Program pelatihan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada masyarakat terkait hal keuangan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana.

**Kata kunci:** Matching Fund, Seni dan Kirab Budaya, Akuntabilitas

## **LATAR BELAKANG**

Tradisi yang muncul di setiap daerah memiliki prosesi, tujuan, dan makna yang berbeda-beda. Salah satunya di desa Cupak, Jombang terdapat perayaan hari besar islam atau lebih dikenal sebagai grebeg Suro. Keberagaman tradisi sebagai bentuk peringatan tersebut antara lain seni dan kirab yang ditampilkan di bulan Suro. Kirab Ritual 1 Suro merupakan tradisi yang dilakukan oleh warga Desa Cupak, Jombang yang terdiri dari upacara adat untuk kirab pusaka dan seni tari. Seni dan kirab budaya yang dilakukan di Desa Cupak, Kecamatan Ngusikan, Jombang merupakan upaya untuk melestarikan budaya dan nilai luhur yang harus dipelihara oleh setiap generasi di daerahnya. Hal ini menjadi bentuk kemajuan kebudayaan karena berasal dari kearifan budaya lokal yang dimiliki suatu daerah. Selain itu seni dan kirab budaya ini merupakan kegiatan untuk mengajak anak bangsa bersama-sama membangun dan melestarikan, menjunjung tinggi seni dan budaya nusantara khususnya yang ada di Desa Cupak, Jombang. Maka untuk itu perlu diadakannya program kerja kegiatan seni dan kirab budaya dalam KKN di desa Cupak, Jombang agar menjadi lebih baik pelaksanaan seni dan kirab budaya kedepannya.

Desa Cupak mempunyai beberapa potensi yang pertama yaitu desa Religi Gunung Pucangan. Tempat ini merupakan peninggalan situs Raja Airlangga yang sering dikunjungi warga sebagai tempat wisata sejarah untuk mengetahui napak tilas perjalanan Raja Airlangga dengan adanya makam-makam kuno, salah satunya Dewi Kilisuci. Setiap malam Jumat Legi adalah momen paling ramai di pertapaan ini karena peziarah dari berbagai kota datang untuk melakukan berbagai ritual religi di Gunung Pucangan, bahkan ada pula yang membawa sesajen. Para warga mengadakan kirab budaya ke Gunung Pucangan ini untuk menjadi uri-uri atau melestarikan adat istiadat setiap tahunnya. Acara kirab ini menampilkan seni drama tari, seni musik yang menceritakan kisah Dewi Kilisuci. Potensi yang kedua yaitu seni kerajinan anyaman kloso (tikar). Warga Desa Cupak memanfaatkan daun pandan sebagai kerajinan untuk membuat tikar dan juga bisa digunakan sebagai oleh-oleh khas Desa Cupak seperti tas, tempat tissue dan lain-lain. Hasil kerajinan seni anyaman ini dipesan hingga ke daerah lain seperti Mojokerto dan Surabaya.

Desa Cupak Jombang memiliki banyak potensi dengan harapan dapat tercapai dengan pengelolaan secara maksimal oleh masyarakat. Pemanfaatan potensi yang dimiliki desa tentunya memberikan manfaat dan kepentingan masyarakat untuk kesejahteraan kehidupan warga setempat. Pengembangan pembangunan sangat lah penting bagi seluruh masyarakat karena pembangunan harus memiliki tujuan yang jelas, terarah dan tepat sasaran yaitu kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perekonomian khususnya perekonomian desa.

Basis pengembangan ekonomi desa yang dapat menjadikan berhasil adalah terciptanya pedesaan yang sejahtera dengan melembagakan ekonomi yang dikelola oleh masyarakat desa itu sendiri.

Pada tahap sosialisasi, masyarakat desa diberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana acara kirab budaya. Mereka diberikan penjelasan mengenai transparansi dalam penggunaan dana, pemisahan dana, dan penyusunan laporan keuangan yang akurat. Tahap pelatihan ditujukan kepada para penari dan pengirama musik yang akan tampil dalam acara kirab budaya. Tahap pendampingan melibatkan peserta kirab budaya dan persiapan peralatan serta perlengkapan acara. Pendampingan dilakukan untuk memastikan bahwa peserta memahami tugas dan tanggung jawab mereka serta menjaga koordinasi yang baik selama acara berlangsung. Hasil dari pelatihan dan pendampingan dalam pengelolaan dana acara kirab budaya pada Desa Wisata Religi Cupak Jombang menunjukkan dampak yang positif dan peningkatan yang signifikan dalam akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana.

Temuan masalah dalam pelaksanaan matching fund pada Desa Cupak Jombang adalah kurangnya pemahaman masyarakat sekitar mengenai akuntabilitas maka membuat lemahnya kemampuan masyarakat dalam pengelolaan keuangan terutama dalam mengelola dana untuk seni dan kirab budaya Desa Cupak Jombang. Maka dilaksanakannya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang akuntabilitas, Meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan keuangan, Meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dengan memanfaatkan potensi yang ada secara maksimal dan melestarikan budaya warisan leluhur pada Desa Cupak Jombang.

## **KAJIAN TEORITIS**

Menurut Mardiasmo (2018), akuntabilitas publik merupakan salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang memiliki makna penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap serangkaian aktivitas dan program yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Akuntabilitas publik juga mencakup tanggung jawab dalam pengungkapan seluruh kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dan penyajian laporan yang tepat.

Konsep akuntabilitas publik dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu akuntabilitas proses, program, kebijakan, hukum, dan kejujuran (Rasul, 2002). Misalnya, akuntabilitas proses melibatkan pengawasan terhadap langkah-langkah yang diambil dalam penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan publik, sedangkan akuntabilitas program berkaitan dengan evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap pencapaian tujuan program yang telah ditetapkan.

Konsep partisipasi memiliki pengertian yang beragam menurut para ahli. Kata "partisipasi" berasal dari bahasa Inggris "participation" yang merujuk pada pengambilan bagian atau pengikutsertaan seseorang (John M. Echols & Hasan Shadily, 2000: 419). Dalam konteks pembangunan, partisipasi mengacu pada peran serta individu atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, baik melalui pernyataan maupun melalui kegiatan, dengan memberikan kontribusi berupa pemikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal, atau sumber daya lainnya, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil pembangunan (I Nyoman Sumaryadi, 2010: 46).

Fasli Djalal dan Dedi Supriadi (2001: 201-202) menjelaskan bahwa partisipasi juga dapat berarti bahwa pembuat keputusan mengundang kelompok atau masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan, melalui penyampaian saran dan pendapat, pemberian barang, keterampilan, bahan, atau jasa. Partisipasi juga mencakup pengenalan kelompok terhadap masalah yang mereka hadapi, melakukan evaluasi terhadap pilihan yang tersedia, mengambil keputusan, dan mencari solusi untuk masalah yang ada. Menurut H.A.R. Tilaar (2009: 287), partisipasi merupakan upaya untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi. Hal ini melibatkan perencanaan dari bawah (bottom-up) yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan di tingkat lokal. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan wujud dari keinginan untuk memperkuat demokrasi dan memastikan bahwa keputusan yang dibuat mencerminkan kepentingan dan aspirasi masyarakat yang terlibat.

Melalui partisipasi, masyarakat dapat memberikan masukan, melakukan pemantauan, dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana dan kegiatan pembangunan. Mereka juga dapat ikut serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat membuka ruang untuk pertanggungjawaban yang lebih transparan dan efektif.

Selain itu, partisipasi masyarakat juga dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam hal pengambilan keputusan. Dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses pembangunan, pemerintah dapat mendapatkan masukan yang lebih luas dan beragam. Hal ini membantu mencegah terjadinya kebijakan yang tidak akuntabel atau bertentangan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Partisipasi yang erat dengan akuntabilitas publik juga melibatkan pengungkapan informasi secara terbuka kepada masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana pembangunan digunakan dan apakah program-program yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan kepentingan mereka. Dengan adanya transparansi

informasi, masyarakat dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah dan memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara bertanggung jawab.

Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan memiliki peran yang penting dalam menciptakan akuntabilitas publik yang kuat. Melalui partisipasi yang aktif, masyarakat dapat berkontribusi dalam meningkatkan pengelolaan dana dan kegiatan pembangunan yang akuntabel serta memastikan bahwa keputusan pembangunan mencerminkan kepentingan dan aspirasi mereka.

Dalam konteks pemerintahan desa, akuntabilitas pengelolaan keuangan desa menjadi salah satu kewajiban administratif sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 113 Tahun 2014 Tentang Pendapatan Desa. Dana yang diterima dan ditransfer ke pemerintah desa setiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk melaksanakan akuntabilitas yang baik dalam pengelolaan keuangan desa guna memastikan transparansi, pertanggungjawaban, dan penggunaan yang efektif dari dana tersebut. Perbaikan akuntabilitas pemerintah juga menjadi isu kebijakan strategis di Indonesia, karena memiliki dampak langsung pada terciptanya good governance atau pemerintahan yang baik. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa, dana desa didefinisikan sebagai alokasi dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Dana desa ini berasal dari hasil pajak daerah dan dana perimbangan keuangan dari pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota dan selanjutnya dialokasikan ke desa.

Pemanfaatan dana desa sebagian besar diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, pelestarian kebudayaan dan kesenian, peningkatan sektor pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan sektor pertanian. Dengan memanfaatkan dana desa secara optimal, potensi-potensi tersebut dapat dikembangkan dan ditingkatkan, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik dan pengelolaan dana desa yang baik, perlu dilakukan langkah-langkah seperti penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta penerapan prinsip-prinsip transparansi dan pertanggungjawaban. Hal ini akan membantu meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa dan memperkuat hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat yang mereka layani.

## **METODE PENELITIAN**

Untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana seni dan kirab budaya, Desa Wisata Religi Cupak Jombang mengimplementasikan metode pelaksanaan berupa sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan. Langkah-langkah berikut diambil untuk memastikan efektivitas dan kesuksesan pelaksanaannya:

a. Sosialisasi

Dalam tahap sosialisasi, pertemuan diadakan dengan seluruh pihak terkait, termasuk pengurus desa, panitia acara, dan masyarakat sekitar. Tujuan utamanya adalah untuk menjelaskan pentingnya pelatihan dan pendampingan akuntabilitas dalam pengelolaan dana seni dan kirab budaya. Melalui sosialisasi, diharapkan seluruh masyarakat dan panitia acara dapat memahami manfaat dari transparansi, pengendalian keuangan, dan pelaporan yang akurat dalam pengelolaan dana. Selain itu, peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam pelaksanaan dan pengawasan penggunaan dana akan dijelaskan secara detail.

b. Pelatihan

Dalam pelatihan, panitia acara dan masyarakat sekitar akan diberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pengelolaan dana seni dan kirab budaya. Mereka akan dilatih dalam penyusunan anggaran yang efisien, pengendalian keuangan yang ketat, serta pelaporan keuangan yang akurat dan transparan. Selain itu, masyarakat dan panitia acara juga akan mempelajari strategi pengelolaan dana sponsor atau donasi yang diterima untuk seni dan kirab budaya, termasuk penggunaan yang optimal dan pelaporan yang terperinci. Melalui pelatihan ini, diharapkan peserta dapat memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola dana seni dan kirab budaya dengan akuntabilitas yang tinggi.

c. Pendampingan

Para Mahasiswa akan memberikan pendampingan dalam mengelola dan melaporkan keuangan seni dan kirab budaya. Para Mahasiswa akan membantu panitia acara dalam menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif, termasuk prosedur pembayaran, pencatatan transaksi, dan audit internal sederhana. Selain itu, para mahasiswa juga akan memberikan bimbingan khusus untuk mengatasi tantangan atau masalah yang mungkin timbul selama pelaksanaan acara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 1. Pelaksanaan Kirab Budaya

Program Pelatihan dan Pendampingan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Acara Kirab Budaya merupakan bagian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan nama Matching Fund Kedaireka 2022. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan September 2022. Fokus utama dari program ini adalah membangun akuntabilitas dalam pengelolaan dana seni budaya dan meningkatkan potensi ekonomi warga desa Cupak. Hal ini bertujuan untuk memberikan manfaat yang berkelanjutan setelah berakhirnya kegiatan Matching Fund ini, khususnya dalam bidang akuntabilitas dan keuangan. Program Pelatihan dan Pendampingan ini dirancang untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada masyarakat desa Cupak terkait manajemen keuangan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana acara Kirab Budaya.

Pelaksanaan pengabdian masyarakat pada tanggal 9 Oktober 2022 dengan tema "Pelatihan dan Pendampingan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Acara Kirab Budaya pada Desa Wisata Religi Cupak Jombang" menghasilkan sejumlah hasil yang signifikan dalam perencanaan acara kirab budaya. Proses ini terdiri dari tiga tahap utama: sosialisasi tentang akuntabilitas dalam pendanaan acara, pelatihan penari dan pengirama musik, serta pendampingan peserta kirab budaya dan penyiapan peralatan dan perlengkapan acara.

Warga Desa Cupak memiliki agenda tahunan yang rutin yaitu kegiatan kirab budaya dalam rangka "Uri-Uri Adat Istiadat" atau bisa disebut dengan melestarikan adat istiadat daerah. Biasanya warga desa Cupak menggelar acara Kirab Budaya ini di bulan Suro (bulan pertama dalam kalender Jawa-Islam). Dalam upaya pelestarian budaya ini dilakukan akulturasi budaya dalam kesenian sehingga bisa menjadi daya tarik masyarakat untuk ikut serta dalam memeriahkan acara tersebut.

Kesenian lain yang dikembangkan oleh warga Desa Cupak yaitu membuat kerajinan anyaman tikar atau juga bisa digunakan sebagai oleh-oleh khas Desa seperti tas, tempat tissue dan lain-lain. Kerajinan anyaman ini dihasilkan para pengrajin rumahan memiliki ciri khas

tersendiri yaitu terbuat dari daun pandan. Nantinya kerajinan anyaman tersebut akan dijual dan biasanya sudah ada pengepul yang akan menjual dan memasarkan kerajinan anyaman tersebut. Hasil kerajinan seni anyaman ini dipesan hingga ke daerah lain seperti Mojokerto, Surabaya dan beberapa kota lainnya.

### **Sosialisasi Akuntabilitas pada Pengelolaan Dana Seni dan Kirab**

Pada tahap sosialisasi, masyarakat desa diberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana acara kirab budaya. Mereka diberikan penjelasan mengenai transparansi dalam penggunaan dana, pemisahan dana, dan penyusunan laporan keuangan yang akurat. Tujuan dari sosialisasi ini adalah agar masyarakat desa memahami dan menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam setiap tahap perencanaan dan penggunaan dana acara kirab budaya. Tahap pelatihan ditujukan kepada para penari dan pengirama musik yang akan tampil dalam acara kirab budaya. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam menampilkan gerakan dan ritme yang tepat sesuai dengan tradisi budaya yang diwakili. Para peserta dilatih dalam teknik penari yang baik, koordinasi antara penari dan pengirama musik, serta mempertahankan keaslian budaya dalam setiap penampilan. Selain itu, praktik terus-menerus dilakukan untuk meningkatkan kualitas penampilan, baik secara individu maupun sebagai kelompok, sehingga acara kirab budaya dapat memberikan kesan yang kuat kepada penonton.



Gambar 2. Wawancara Narasumber



Gambar 3. Sosialisasi Masyarakat

### **Pelatihan Akuntabilitas pada Pengelolaan Dana Seni dan Kirab**

Melalui pelatihan ini, diharapkan warga desa Cupak dapat mengoptimalkan penggunaan dana yang diterima selama kegiatan Kirab Budaya. Dengan memahami prinsip akuntabilitas dan keuangan yang baik, mereka akan mampu mengelola dana secara efektif dan transparan. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mendorong kreativitas dalam bidang seni budaya di desa Cupak. Melalui pelatihan ini, peserta akan diberikan pengetahuan dan keterampilan dalam merencanakan, mengelola, dan melaksanakan acara Kirab Budaya yang

kreatif dan menarik. Dengan demikian, diharapkan acara Kirab Budaya dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan dan berkontribusi pada peningkatan potensi ekonomi desa Cupak melalui sektor pariwisata. Hasil dari pelatihan dan pendampingan dalam pengelolaan dana acara kirab budaya pada Desa Wisata Religi Cupak Jombang menunjukkan dampak yang positif dan peningkatan yang signifikan dalam akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana.



Gambar 4. Pelatihan Seni Kreatif Anyaman



Gambar 5. Pelatihan Seni Tari

### **Pendampingan Akuntabilitas pada Pengelolaan Dana Seni dan Kirab**

Selanjutnya, tahap pendampingan melibatkan peserta kirab budaya dan persiapan peralatan serta perlengkapan acara. Pendampingan dilakukan untuk memastikan bahwa peserta memahami tugas dan tanggung jawab mereka serta menjaga koordinasi yang baik selama acara berlangsung. Selain itu, persiapan peralatan dan perlengkapan juga dilakukan dengan cermat, termasuk pengecekan dan perawatan kostum, alat musik, dan atribut lainnya. Hal ini penting agar peserta dapat tampil dengan percaya diri dan memastikan kelancaran acara. Koordinasi yang efektif dengan tim logistik dan manajemen acara juga menjadi bagian penting dari persiapan yang dilakukan.



Gambar 6. Pendampingan Kirab Budaya



Gambar 7. Pendampingan Kirab Budaya

Beberapa hasil dan pembahasan yang dicapai adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman yang Meningkat tentang Akuntabilitas dan Transparansi:

Melalui pelatihan dan pendampingan, masyarakat Desa Wisata Religi Cupak Jombang meningkatkan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip dasar akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana. Mereka memahami pentingnya menjaga catatan keuangan yang akurat, melakukan pemisahan dana, serta menyusun laporan keuangan yang terperinci dan transparan.

2. Penerapan Praktik-Praktik Terbaik dalam Pengelolaan Dana:

Setelah mengikuti pelatihan, masyarakat desa dapat menerapkan praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan dana acara kirab budaya. Mereka berhasil menyusun rencana pengelolaan dana yang terstruktur, melakukan pemisahan dana sesuai kebutuhan, serta menerapkan mekanisme kontrol yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan atau penggunaan dana yang tidak sesuai.

3. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi:

Dengan adanya pelatihan dan pendampingan, terjadi peningkatan yang signifikan dalam akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana acara kirab budaya. Masyarakat desa dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan terperinci, serta secara rutin melaporkan penggunaan dana kepada pihak terkait dan masyarakat umum. Hal ini membantu membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa dana digunakan dengan tepat dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

4. Peningkatan Kepercayaan Masyarakat dan Pihak Terkait:

Dengan peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana, masyarakat dan pihak terkait seperti lembaga pemerintah, sponsor, dan donatur, memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap desa dan acara kirab budaya yang diadakan. Kepercayaan ini penting dalam memperoleh dukungan finansial dan partisipasi aktif dari pihak terkait, serta memberikan dampak positif dalam pengembangan desa secara keseluruhan.

## **KESIMPULAN**

Demikian kesimpulan kegiatan program kerja Seni Kirab di Desa Cupak, Kecamatan Ngusikan, Jombang. Telah dilaksanakan sejak tanggal 17 September sampai dengan 10 Oktober 2022. Dalam program kerja yang telah terlaksana, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Mahasiswa dituntut untuk dapat memahami dan membantu pengaktifan kembali kegiatan kirab budaya yang pernah dijalankan warga desa Cupak, Kec. Ngusikan, Kabupaten Jombang.
2. Seluruh program kerja ini telah dilaksanakan se maksimal mungkin, mungkin ada beberapa faktor dan juga kondisi yang tidak memungkinkan
3. Keberhasilan akan adanya program kerja ini pada akhirnya akan memberikan manfaat yang saling menguntungkan antara masyarakat sekitar dan mahasiswa itu sendiri. Dampak positif bagi mahasiswa sendiri adalah meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar dan memperluas pemikiran dalam bidang sosial dan budaya. Sedangkan bagi masyarakat adalah meningkatkan semangat dan tetap mengingat akan budaya nenek moyang.

## **SARAN**

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat atas pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana seni dan kirab budaya pada Desa Cupak Jombang.
2. Memperkuat kemampuan pengelolaan keuangan dengan menyusun perencanaan anggaran yang baik, pencatatan yang akurat dan pelaporan yang transparan.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat, tauhid, dan hidayah NYA kami dapat menyelesaikan artikel tentang “Pelatihan Dan Pendampingan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Seni Dan Kirab Budaya Pada Desa Wisata Religi Cupak Jombang” hingga selesai.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. kami ingin berterima kasih kepada:

1. Ibu Irda Agustin Kustiwi, SA, MA selaku dosen pembimbing lapangan, atas bimbingan dan dukungannya.
2. Orang tua karena berkat semangat dan dukungan mereka, kami dapat menyelesaikan kegiatan ini.
3. Teman-teman yang selalu mendukung kami.

4. Kami juga ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu dan menjadi sumber informasi selama pengabdian berlangsung sehingga kami dapat menyelesaikan artikel ini.

Kami menyadari bahwa artikel ini masih belum sempurna. Karena kami juga masih dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat. Maaf jika terdapat kesalahan dalam penulisan artikel ini dan harap maklum. Semoga isi dari artikel ini dapat bermanfaat bagi kita semua

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Djalal, Fasli dan Dedi Supriadi. 2001. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa
- Echols, John M. dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1988.
- H.A.R Tilaar.2009. *Kekuasaan dan Pendidikan: Kajian Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rinika Cipta
- I Nyoman Sumaryadi. (2010). *Efektivitas Implementasi Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Rohman, S. A. (2022). *AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2020 (Studi Kasus Di Desa Pagerageung Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya)* (Doctoral dissertation, Universitas Siliwangi).
- Rasul, Syahrudin. 2002. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Dan Anggaran*. Jakarta : Detail Rekod.
- Widayati, N., & Aco, F. (2020). Pemanfaatan Dana Desa (DD) di Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman. *Jurnal Enersia Publik: Energi, Sosial, dan Administrasi Publik*, 3(2).